

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR  
( Studi Kasus Putusan Nomor.3046/Pid.B/2010/PN.Sby. )**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

DEDY PRATAMA  
NPM. 0871010095

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus Putusan Nomor 3046/Pid.B/2010/PN.Sby.)**

Disusun Oleh :

DEDY PRATAMA  
NPM. 0871010095

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM  
NIP.19620625 199103 1 001

Mengetahui  
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM  
NIP.19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus Putusan Nomor 3046/Pid.B/2010/PN.Sby)

Oleh :

DEDY PRATAMA

NPM. 0871010095

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal : 06 Agustus 2012  
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji

1.

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM  
NIP.19620625 199103 1 001

Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM  
NIP.19620625 199103 1 001

2.

Subani, SH, M.Si  
NIP.19510504 198303 1 001

3.

Yana Indawati, SH.,M.Kn  
NPT.3 7901 07 0224

Mengetahui  
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM  
NIP.19620625 199103 1 001

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus Putusan Nomor 3046/Pid.B/2010/PN.Sby)**

Oleh :

**DEDY PRATAMA**  
NPM. 0871010095

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal 30 Juli 2012

Pembimbing Utama

Tim Penguji

1.

**Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM**  
NIP.19620625 199103 1 001

**Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM**  
NIP.19620625 199103 1 001

2.

**Subani, SH., M.Si**  
NIP.19510504 198303 1 001

3.

**Yana Indawati, SH.,M.Kn**  
NPT.3 7901 07 0224

Mengetahui,  
DEKAN

**Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM**  
NIP.19620625 199103 1 001

Surat Pernyataan Keaslian Penulisan Skripsi

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedy Pratama  
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 27 Juli 1989  
NPM : 0871010095  
Konsentrasi : Pidana  
Alamat : Perum Griya Kencana 2N/4, Driyorejo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :  
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN  
ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus pada Putusan Nomor 3046/Pid.B/2010/PN.Sby.)”  
dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta  
saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan  
(plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia  
dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaannya saya (Sarjana Hukum) yang saya  
peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa  
tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui  
Pembimbing

Surabaya, 18 Juli 2012  
Penulis,

(Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM)  
NIP.1960625 199103 1 001

Dedy Pratama  
NPM. 0871010095

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, segala puji bagi Allah SWT, sang pemberi nafas pada seluruh makhluk. Hanya kepadaNya-lah syukur di panjatkan atas selesainya Skripsi ini sejujurnya penulis akui bahwa pendapat sulit ada benarnya, tetapi faktor kesulitan itu lebih banyak datang dari diri karena itu, kebanggaan penulis bukanlah pada selesainya Skripsi ini, melainkan kemenangan atas berhasilnya menundukan diri sendiri. Semua kemenangan dicapai tidak lepas dari bantuan berbagai pihak selama proses penyelesaian Skripsi itu, sehingga penulis mampu menyusun skripsi dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor.3046/Pid.B/2010/PN.Sby.)". Penulisan ini di susun untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan Tugas Akhir dalam mencapai Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan petunjuk dan bantuan yang tidak ternilai harganya, dengan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Dan juga sebagai Dosen pembimbing utama dalam Skripsi ini.
2. Bapak H. Sutrisno, SH., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
3. Bapak Drs. Ec. Gendut Sukarno, MS. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
4. Bapak Subani ,SH.,M.Si, Selaku Ketua Proqram Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

5. Bapak Fauzul Aliwarman, S.Hi., M.Hum. Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
6. Semua staf dosen maupun staf pegawai fakultas yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.
7. Terima kasih banyak kepada seluruh staf dibagian pidana biasa di Pengadilan Negeri Surabaya.
8. Kepada Bapak Hakim I Made Sukardani SH.,MH.di Pengadilan Negeri Surabaya
9. Kepada Shindy Avaianta yang memberikan semangat dan dorongan dalam skripsi saya ucapkan terima kasih banyak
10. Kepada kedua orang tua saya yang telah membantu dan memberikan semangat dalam Skripsi saya.
11. Kepada Kakek dan Nenek saya yang mendoakan dan memberikan semangat dalam skripsi ini saya ucapkan terima kasih banyak.
12. Kepada Teman-teman di sekitar lingkungan rumah semuanya saya ucapkan banyak terima kasih yang memberikan semangat dan dorongan.
13. Kepada Anita R dan Lian Lufi Ulansari terima kasih banyak.
14. Kepada windhu, binar, jaka, pancar, fitra, alvin, perdana, fani, afif, ekky, saiful,radit dan ihsan, selaku teman-teman penulis yang telah memberikan keluangan waktu untuk bersedia membantu menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam penyusunan Skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin untuk menuangkan ide dan kemampuan dengan banyak berkonsultasi dan membaca literatur. Namun demikian penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan, oleh karena itu demi

kesempurnaan Skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Semoga Skripsi ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum dan berguna bagi masyarakat.

Surabaya, Juli 2012

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Kajian Pustaka .....	7
1.5.1 Pengertian Tindak Pidana .....	7
1.5.2 Pengertian PertanggungJawaban Pidana .....	8
1.6 Penyalahgunaa Kedudukan Untuk Bercabul .....	10
1.6.1 Membujuk orang yang belum dewasa untuk bersetubuh dengan orang lain .....	11
1.6.2 Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman .....	11
1.7 Pengertian Anak .....	11
1.7.1 Pengertian tentang perlindungan anak .....	15
1.8 Pengertian tentang pencabulan.....	15
1.8.1 Pengertian Perbuatan Cabul .....	16
1.8.2 Pengertian Tindak Pidana Mengadakan Hubungan Kelamin di Luar Pernikahan Dengan Seorang Wanita Yang Belum Mencapai Usia Lima Belas Tahun.....	17

1.8.3 Faktor-faktor Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencabulan .....	17
1.8.4 Pengertian Tentang Pelecehan Seksual .....	18
1.8.5 Pasal-pasal Tentang Kejahatan Pencabulan .....	19
1.8.6 Pengertian Visum Et Repertum .....	23
1.9 Metode Penelitian .....	24
1.9.1 Pendekatan Masalah .....	24
1.9.2 Sumber Data .....	24
1.9.2.1 Data Sekunder .....	25
1.10 Pengumpulan Data .....	26
1.10.1 Teknik Analisis Data .....	26
1.10.2 Sistematika Penulisan .....	27
1.11 Lokasi Penelitian .....	28
1.12 Waktu Penelitian .....	29
<b>BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR</b>	
2.1 Faktor - faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur .....	30
2.2 Analisa terhadap beberapa faktor tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur .....	40
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR</b>	
3.1 Gambaran kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3046/Pid.B/2010/PN.Sby. ....	44
3.2 Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur berdasarkan putusan No 3046/Pid.B/2010/PN.Sby. .....	46
3.2.1 Anak yang melakukan perbuatan cabul .....	53
3.2.2 Analisa kasus berdasarkan putusan No. 3046/Pid.B/2010/PN.Sby .....	55

## BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan..... 64

4.2 Saran ..... 65

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Lampiran 2 : Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Lampiran 3 : Surat Pengantar Research / Penelitian Pengadilan Negeri Surabaya

Lampiran 4 : Putusan Perkara Nomor : 3046/Pid.B/2010/PN.Sby.

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Dedy Pratama  
NPM : 0871010095  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 27 Juli 1989  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN  
ANAK DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus Putusan Nomor 3046/Pid.B/2010/PN.Sby.)

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana pencabulan dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Sumber data diperoleh dari literature-literatur, karya tulis ilmiah perundang-undangan yang berlaku. Analisa data menggunakan analisa kualitatif yang diperoleh dari wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, pengamatan lapangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perkembangan dari zaman ke zaman maka terdapat pula perubahan dalam masyarakat banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur terhadap korban yang dilakukan terhadap perempuan yang masih di bawah umur apalagi sekarang ini pelakunya adalah anak banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana pencabulan dari faktor internal dan faktor eksternal kedua faktor inilah yang sangat mempengaruhi pelaku untuk melakukan perbuatan pencabulan ini dapat merusak moral dan masa depan anak tersebut terutama pada korban. Pertanggung jawaban pelaku terhadap tindak pidana pencabulan anak yang masih di bawah umur putusan-putusan hakim sangat tidak memihak pada korban yang ada hukuman yang dijatuhkan ringan terhadap pelaku yaitu anak ini tidak sepadan dengan apa yang dilakukannya ini perlu ditangani apabila terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak yang mana hukuman harus seimbang dengan perbuatanya.

**Kata Kunci :** PertanggungJawaban Pidana Pelaku, Tindak Pidana Pencabulan Anak, Pencabulan Anak, di bawah umur

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA  
TIMUR  
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Dedy Pratama  
NPM : 0871010095  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 27 Juli 1989  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus Putusan Nomor 3046/Pid.B/2010/PN.Sby.)

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana pencabulan dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Sumber data diperoleh dari literature-literatur, karya tulis ilmiah perundang-undangan yang berlaku. Analisa data menggunakan analisa kualitatif yang diperoleh dari wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, pengamatan lapangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perkembangan dari zaman ke zaman maka terdapat pula perubahan dalam masyarakat banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur terhadap korban yang dilakukan terhadap perempuan yang masih di bawah umur apalagi sekarang ini pelakunya adalah anak banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana pencabulan dari faktor internal dan faktor eksternal kedua faktor inilah yang sangat mempengaruhi pelaku untuk melakukan perbuatan pencabulan ini dapat merusak moral dan masa depan anak tersebut terutama pada korban. Pertanggung jawaban pelaku terhadap tindak pidana pencabulan anak yang masih di bawah umur putusan-putusan hakim sangat tidak memihak pada korban yang ada hukuman yang dijatuhkan ringan terhadap pelaku yaitu anak ini tidak sepadan dengan apa yang dilakukannya ini perlu ditangani apabila terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak yang mana hukuman harus seimbang dengan perbuatanya.

Kata Kunci : PertanggungJawaban Pidana Pelaku, Tindak Pidana Pencabulan Anak, Pencabulan Anak, di bawah umur

UNIVERSITY NATIONAL DEVELOPMENT "veterans" EAST JAVA  
FACULTY OF LAW

Nama : Dedy Pratama  
NPM : 0871010095  
Date and Place of Birth : Surabaya, July 27, 1989  
Studies Program : Strata 1 (S1)  
Thesis Title :

CRIMINAL LIABILITY ACTORS CRIME UNDER AGE CHILD  
ABUSE

(Decision of Case Study No. 3046/Pid.B/2010/PN.Sby.)

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence criminal sexual abuse and perpetrators of criminal sexual abuse minors. This study uses the juridical-normative. Sources of data obtained from the literature-literature, scientific writing invitation applicable legislation. Analysis of data obtained using qualitative analysis of interviews the Surabaya District Court judge, field observations. Results of the study can be concluded that the development from age to age, there is also a change in the number of cases of sexual abuse crimes committed by children who are under the age of the victim committed against women who are minors especially now that the culprit is a child of many factors that influence a child to commit a criminal act of abuse of factors both internal and external factors that greatly influence the offender to commit sexual abuse can damage the morale and the future of these children, especially the victims . Accountability for perpetrators of child sexual abuse crimes are still under the age of the decisions of the judges is not in favor of the victims who have mild punishment meted out to perpetrators of the child is not commensurate with what he is doing this needs to be addressed in case of child abuse committed by which must be balanced with actions punishment.

Keywords: Perpetrators Of Criminal Responsibility, Crime Child abuse, child abuse, underage

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1 Latar Belakang

Seiring berjalannya zaman di era globalisasi dan teknologi dari masa ke masa tentunya mampu memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun tidak dapat dilupakan juga bahwa di sisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa dampak yang buruk terhadap manusia jika semuanya itu tidak ditempatkan tepat pada tempatnya. Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan jaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut termasuk tuntutan hidup.

Mengingat bahwa pembangunan nasional berjalan seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak. Seseorang akan cenderung berusaha memenuhi kebutuhannya dalam rangka mempertahankan hidup. Bagi mereka yang memiliki keahlian dibidang tertentu dan ditunjang dengan tingkat pendidikan yang memadai akan cenderung memiliki tingkat ekonomi yang lebih terjamin karena mereka dapat memperoleh pekerjaan berdasarkan keahlian yang dimilikinya tersebut. Lain halnya bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan



yang bisa dikatakan rendah dan tidak memiliki keahlian tertentu. Mereka cenderung memiliki tingkat ekonomi yang menengah ke bawah. Seiring kemajuan jaman, kebutuhan mereka akan terus bertambah sedangkan di sisi lain perekonomian mereka semakin terpuruk. Hal tersebut dapat memicu seseorang untuk mengambil jalan pintas demi memenuhi kebutuhannya dengan melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat, yaitu kejahatan.

Membicarakan perbuatan pidana tidak lepas dengan akibat-akibat yang di timbulkan di tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok akibat-akibat yang di timbulkan ini menjadi tolak ukur suatu modus dari perbuatan pidana, apakah perbuatan pidana itu merupakan kejahatan atau pelanggaran. Ada yang berasumsi bahwa suatu kejahatan itu tidak tergolong serius, meresahkan, dan merugikan masyarakat, namun ada pula yang menyatakan bahwa kejahatan itu terjadi benar-benar mengakibatkan penderitaan yang luar biasa. Selama perkembangan kehidupan manusia, ketentraman dan kemandirian selalu diharapkan oleh setiap manusia, akan tetapi ketentraman dan keamanan ini sering terganggu di dalam kehidupan masyarakat salah satu yang dapat mengguncangkan kehidupan bermasyarakat adalah kejahatan istilah kejahatan itu mempunyai pengertian baik secara yuridis maupun kriminologis Bambang purnomo mengemukakan pengertian secara yuridis bahwa tidak semua perbuatan manusia dapat disebut sebagai tindak pidana, hanya suatu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam Undang-undang yang disebutkan sebagai tindak pidana, selanjutnya dalam pengertian secara kriminologis menurut Boger dalam bukunya pengantar tentang kriminologi yang menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan anti social yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).<sup>1</sup>

Persoalan kejahatan kemudian menjadi problem serius yang dihadapi oleh setiap bangsa dan Negara didunia ini, karena kejahatan pasti menimbulkan korban. Masalah kejahatan tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat yang kemungkinan munculnya sering kali tidak dapat diduga atau

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar Andang, Kriminologi, Refika Aditama, cetakan I, Bandung, 2010, h.318.

tiba-tiba saja terjadi disuatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan timbul suatu kejahatan. Siapa saja dapat menjadi korban kejahatan namun pada umumnya adalah perempuan dan anak karena berdasarkan fisik mereka lebih lemah dari pelaku yang pada umumnya laki-laki.

Pelecehan seksual atau pun pencabulan pada dasarnya adalah merupakan bagian dari kekerasan gender, artinya kedua bentuk tindak pelanggaran terhadap hak perempuan ini dilakukan bukan semata-mata karena faktor spontanitas atau sekedar penyaluran libido para lelaki yang sudah tak bisa lagi di tunda melainkan peristiwa ini terjadi karena di belakang benak pelaku maupun korban. Dalam berbagai kasus pencabulan atau kekerasan seksual lainnya, sering kali yang dipersalahkan adalah pihak korban. Pengertian cabul adalah sesuatu yang melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan. Berbeda dengan pengertian cabul, pornografi diartikan sebagai pelanggaran kesusilaan dengan tulisan atau gambaran.

Bahwa yang disebut dengan pornografi adalah perbuatan mempertontonkan , menyiarkan, menyediakan supaya dapat diperoleh surat, gambar, buku atau barang-barang yang melanggar kesusilaan yang dapat menimbulkan nafsu birahi<sup>2</sup>. Kedua hal tersebut termasuk dalam ruang lingkup dari delik susila. Pengertian delik susila adalah segala delik yang berhubungan dengan sex. Sebagai delik susila dan sebagai obyek hukum pidana didasarkan aturan-aturan

---

<sup>2</sup> J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Cetakan 13, Jakarta, 2009, h.131.

kesusilaan dalam arti yang luas. Jadi pada dasarnya menurut antara cabul maupun pornografi mempunyai pengertian yang sama yaitu merupakan sesuatu yang melanggar kesusilaan

Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun sesama anak di bawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak di bawah umur dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku padahal pelakunya adalah juga anak-anak yang masih di bawah umur.

Pencabulan yang dilakukan terhadap sesama anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan

dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat, padahal didalam KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) telah tertulis aturan hukum tentang pencabulan dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dimana perbuatan cabul sendiri merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual: misalnya, perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan birahi<sup>3</sup>

Adapun Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dimana ancaman pidananya lebih berat dari pada pasal-pasal tersebut diatas yaitu paling lama 15 tahun. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 82 yang menyebutkan bahwa:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul di pidana penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

---

<sup>3</sup> Andi Hamsah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta, 2008, h.32.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul :PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor.3046/Pid.B/2010/PN.Sby.)

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaku tindak pidana pencabulan anak yang masih di bawah umur ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana pencabulan anak yang masih di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

## 1.4 Manfaat penelitian

### 1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya mengenai pencabulan terhadap anak di bawah umur.
- b. Sebagai masukan kepada lembaga-lembaga hukum terkait tindak pidana pencabulan anak di bawah umur kepada aparat penegak hukum serta kepada pemerintah agar dapat memberikan keadilan bagi masa depan.

#### 1.4.2 Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis, menambah perbendaharaan pengetahuan khususnya dalam bidang pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur sebagai obyek pencabulan.
- b. Bagi institusi, digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam memecahkan permasalahan tindak pidana pencabulan anak yang masih di bawah umur

### 1.5 Kajian Pustaka

#### 1.5.1 Pengertian tindak pidana

Tindak pidana (straftbaar feit) adalah suatu kelakuan manusia yang di ancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya di larang dengan ancaman pidana (Vos 1950:25).<sup>4</sup>

Menurut Pompe merumuskan bahwa (straftbaar feit) atau tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.<sup>5</sup>

Menurut Simons merumuskan strafbbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang

---

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Cetakan VI, Jakarta, 1992, h.91.

<sup>5</sup> Adami Chazawi, Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Cetakan V, Jakarta, 2010, h.72.

dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat di hukum.<sup>6</sup>

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur obyek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana<sup>7</sup>

#### 1.5.2 Pengertian pertanggungjawaban pidana

Pengertian pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat di jelaskan dibawah ini:

Pengertian Pertanggungjawaban Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan pysikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana

---

<sup>6</sup> Ibid, h.75.

<sup>7</sup> Ibid, h.82.

menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

- a. Keadaan Jiwanya
  1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
  2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (Gage, Idiot, gila dan sebagainya)
  3. Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotisme, amarah yang meluap dan sebagainya).
- b. Kemampuan Jiwanya :
  1. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya.
  2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.
  3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Adapun menurut Van Hamel, sate:

- (1) seseorang baru bisa diminta pertanggungjawabannya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  1. Orang tersebut harus menginsafi bahwa perbuatannya itu menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
  2. Orang tersebut harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya tersebut.

Selain itu menurut, doktrinal untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab harus ada dua hal yaitu Adanya kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hak. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafannya tentang baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Sementara itu berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab KUHP tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara Negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.

Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu :

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya.
2. Jiwanya terganggu karena penyakit.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur



pertanggung jawaban harus juga dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, maka dalam praktek dipakai yaitu bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain.

Maka dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pertanggung jawaban pidana yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang.<sup>8</sup>

Untuk memperjelas mengenai pengertian pertanggung jawaban pidana itu, baik kita lihat apa yang ditulis oleh prof Roeslan Saleh sebagai berikut:

Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu di pertanggung jawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga dengan dilakukannya perbuatan itu, kenapa perbuatan yang obyektif tercela, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh sebab itu perbuatan tersebut adalah pada diri si pembuat.<sup>9</sup>

#### 1.6 Penyalahgunaan kedudukan untuk bercabul :

Dibawah ini akan dijelaskan tentang penyalahgunaan kedudukan untuk

bercabul yang termuat dalam pasal 293,294 dan 295 KUHP adalah:

Dalam pasal 293, 294 dan 295 KUHP memuat tindak pidana yang mencerminkan penyalah-gunaan kedudukan seorang untuk melakukan atau menyuruh melakukan cabul oleh seorang yang mudah dapat di pengaruhi oleh si pelaku.

Tindak pidana dari pasal 293 adalah sebagai berikut, dengan sengaja membujuk seorang belum dewasa yang kelakumannya tidak tercela yang diketahui atau pantas harus dapat disangka, bahwa orang itu masih belum dewasa, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia secara:

- a.Memberi hadiah atau menjajikan akan memberi uang atau barang, atau
- b.Menyalahgunakan kekuasaanya yang timbul dari hubunganya dengan orang belum dewasa itu, atau
- c.Menipu

<sup>8</sup> <http://www.ombar.net/2009/10/pengertian-pertanggungjawaban.html> 12.01 AM.

<sup>9</sup> Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Cetakan I, Yogyakarta, 1988, h.105.

Tindak pidana ini di ancam dengan hukuman selam-lamanya lima tahun dan hanya dapat dituntut atas pengaduan si korban (ayat 2), sedang tengang-tenggang mengenai pengaduan ini dari pasal 74 di perpanjang sampai Sembilan dan dua belas bulan (ayat 3).<sup>10</sup>

#### 1.6.1 Membujuk orang yang belum dewasa untuk bersetubuh dengan orang lain

Hal ini tidak diatur tersendiri melainkan sisipan pada pasal 290 ke-3 yang rumusnya sebagai berikut :

Barang siapa membujuk seorang yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu di kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak-anak, baik anak wanita maupun pria. Rumusan umur “belum lima belas tahun” tidak terlepas dari pasal 45 KUHP. Seyogianya hal ini di sesuaikan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>11</sup>

#### 1.6.2 Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Hal ini dirumuskan pada pasal 289 KUHP sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Persepsi terhadap kata “cabul” tidak dimuat dalam KUHP. Kamus Bahasa Indonesia memuat artinya yaitu: Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).<sup>12</sup>

### 1.7 Pengertian anak secara umum yang di maksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak – tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco Cetakan III, Jakarta, 1980, h.126.

<sup>11</sup> Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta, 1996, h.62.

<sup>12</sup> Ibid, h.64.

intercross) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan.<sup>13</sup>

Pengertian anak menurut pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pokok Perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) menentukan bahwa anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.

Pendapat Julia D.Gunarsa beliau dalam mengemukakan pendapatnya tentang batas usia anak, remaja dan dewasa, bertitik tolak pada batas usia remaja yang dinyatakan bahwa “Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yakni antara 12 sampai 21 tahun”.<sup>14</sup>

Pendapat Zaskiah Daradjat, memberikan pendapat mengenai batas usia anak-anak remaja dan dewasa dengan mendasarkan pada usia remaja, dengan menyatakan bahwa: Masa Sembilan tahun antara 13 dan 21 tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka

---

<sup>13</sup> Tolip Setiady, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Cetakan I, Bandung, 2010, h.173.

<sup>14</sup> Djoko Prakoso, Loc. cit., h.154.

bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap cara berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa.

Dari kedua pendapat sarjana (psikolog) tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa batas umur anak (anak-anak) adalah 12 atau 13 tahun, sedangkan batas umur remaja adalah 21 tahun. Dengan demikian masa dewasa dimulai setelah 21 tahun.

Yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar ikatan perkawinan. Bahwa yang dimaksud dengan anak adalah remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yakni 12 sampai 21 tahun bahwa yang dimaksud batas usia anak disini adalah dimulai umur 12 tahun dan maksimal 21 tahun. Bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan maka tidak dipergunakan istilah anak dibawah umur terhadap adalah:

1. Mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin .
2. Mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur genap 21 tahun yang kemudian bercerai tidak kembali lagi menjadi dibawah umur
3. Yang dimaksud dengan perkawinan tidak termasuk perkawinan anak.

Kemudian dinyatakan pula bahwa untuk menghilangkan ketidak pastian yang ditimbulkan oleh hendak menentukan arti dari pada istilah hukum yang menyangkut tentang arti dari “belum dewasa” sepanjang ini menyangkut penduduk dinegara ini. Jadi seseorang bisa disebut “belum dewasa” apabila memenuhi persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila peraturan Undang-undang memakai istilah “belum dewasa” maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksud adalah segala orang yang belum mencapai 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin atau telah melakukan sebuah perkawinan yang sah. Dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 didalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- 2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai usia 22 tahun maka tidaklah ia kembali lagi dalam istilah belum dewasa. Yang dinyatakan orang yang belum dewasa menurut Kitab Undang-undang hukum perdata adalah: mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu

telah kawin apabila ia kawin dan bercerai sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

- 3) Dalam perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.<sup>15</sup>

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 45 KUHP, sehubungan dengan masalah tindak pidana anak ini. Maka dapat kita hubungkan dengan apa yang disebut juvenile delinquency yang dalam bahasa Indonesia belum mendapatkan keseragaman penyebutannya seperti kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda. Secara pengertian dapat dijabarkan bahwa juvenile yang berarti anak dan delinquency adalah kejahatan<sup>16</sup>

Kenakalan remaja atau juvenile delinquency bukanlah suatu pengertian yang sederhana. Kenakalan remaja berarti hal-hal yang berbeda bagi individu-individu yang berbeda dan ini berarti hal-hal yang berbeda bagi kelompok-kelompok yang berbeda. Kenakalan remaja berarti hal-hal yang berbeda dalam golongan yang sama pada waktu-waktu yang berbeda. Dalam penggunaan yang populer, pengertian kenakalan remaja digunakan untuk melukiskan sejumlah besar tingkah laku anak-anak dan remaja yang tidak baik atau yang tidak disetujui. Dalam pengertian ini hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja yang tidak disukai oleh orang lain disebut kenakalan remaja.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Tolip Setiady., Op cit., h.173.

<sup>16</sup> Hang out, Mata Kuliah Hukum Perlindungan Anak.

<sup>17</sup> Sri Widoyanti Wiratmono Soekito, Anak dan Wanita Dalam Hukum, LP3ES, Jakarta, 1982,

### 1.7.1 Pengertian tentang perlindungan anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak atau remaja oleh Lembaga Prayuna pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanaan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintahan dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah nikah, sesuai dengan hak asasi dan kepepinagannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.<sup>19</sup>

### 1.8 Pengertian tentang pencabulan

Di berbagai negara terdapat perbedaan definisi mengenai pencabulan. Amerika mendefinisikan pencabulan adalah “kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban”. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan,

---

<sup>18</sup> Maidin Gultom, *Pelindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Cetakan I, Bandung, 2008, h.33.

<sup>19</sup> Ibid, h.34.

yaitu “persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Bila mengambil definisi dari buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah “semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan”. R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul di dalam KUHP yaitu “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan ( kesopanan ) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>20</sup>

1.8.1 Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi. Dalam pengertian “segala perbuatan” apabila telah di anggap melanggar kesusilaan, maka itu dapat di masukkan sebagai perbuatan cabul, dan harus tidak ada unsur tidak mesti ada unsur paksaan atau kekerasan. Selain itu pengertian dalam KUHP menunjukkan ketika terjadi perbuatan cabul, maka penilainya di kembalikan pada nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat, bukan penilaian perempuan yang mengalami.<sup>21</sup>

Di dalam kamus bahasa Indonesia, istilah cabul mempunyai arti sebagai keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Dalam KUHP pasal yang termasuk dalam perbuatan cabul adalah:

- 1) Perbuatan cabul itu sendiri baik yang dilakukan dengan lawan jenis maupun dengan yang sejenis (kurang dari 18 tahun)
- 2) Persetubuhan (pasal 495), baik yang dilakukan oleh orang tua kepada anak sendiri, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasan, pembantu rumah tangga, atau bawahannya : maupun persetubuhan yang dilakuakn oleh pejabat kepada bawahannya (termasuk guru, dokter, pengurus petugas, pegawai kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan penjelasan ini, perbuatan cabul yang dimaksudkan di bawah ini hanya memiliki perbedaan tipis dengan perkosaan. Kondisi seperti ini pada akhirnya membuat kejahatan perkosaan yang tidak dapat di buktikan unsur paksaan atau robeknya selaput vagina kemudian dikelompokkan atau di masukkan ke dalm tindak pidana perbuatan cabul. Ini berarti bahwa perempuan sebagai korban perkosaan harus menerima kekalahan karena hukum memang tidak berpihak kepadanya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/kejahatan-pencabulanpersetubuhan.html>.10.55

AM.

<sup>21</sup> Dewita Hayu Shinta, Posisi Perempuan Dalam RUU KUHP, LBH APIK Jakarta dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Cetakan I, Jakarta, 2007, h.49.

<sup>22</sup> Ibid, h.50.

1.8.2 Tindak pidana mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 287 KUHP yang rumusan aslinya adalah barang siapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita yang di ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara lamanya Sembilan tahun:

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur:

1. Unsur-unsur subyektif: yang di ketahui, yang sepantasnya harus ia duga
2. Unsur-unsur objektif: barang siapa, mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan, wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.

Dari diisyaratkan dua unsur subyektif secara bersama-sama yakni unsur yang ia ketahui dan unsur pidana yang sepantasnya harus ia duga di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP itu mempunyai unsur subyektif. Kedua unsur subyektif tersebut meliputi unsur obyektif ketiga tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yakni unsur wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat di nikahi.

Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subyektif tersebut baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat di nikahi.<sup>23</sup>

### 1.8.3 Faktor-faktor yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan

Dari sejumlah pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa factor penyebab pencabulan dan perkosaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- 2) Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi

---

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta, 2009, h.113.



membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah ahklak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.

- 3) Rendahnya pengamalan dan pengkhayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain
- 4) Tingkat control masyarakat yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- 5) Putusan hakim yang tersa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
- 6) Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya di biarkan mengembara menuntutnya untuk dicariakan kompensasi pemuasnya.
- 7) Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap,ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.<sup>24</sup>

#### 1.8.4 Pengertian pelecehan seksual

Supanto (1997:7) mengutip dari Sanistu (dalam Daldjoeni, 1994: 4) mengartikan pelecehan seksual sebagai semua tindakan seksual atau kecenderungan bertindak seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang bersifat intimidasi non fisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasat mata dengan memegang, menyentuh, meraba, mencium) yang dilakukan oleh laki-laki atau kelompoknya terhadap perempuan atau kelompoknya. Unsur penting dari pelecehan seksual adalah:<sup>25</sup>

- a. Adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Dengan demikian, pengakuan terhadap integritas tubuh perempuan menjadi penting dalam pelecehan seksual. Oleh karena itu, perbuatan seperti siulan, kata-kata komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila)

---

<sup>24</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Cetakan I, Bandung, 2001, h.72.

<sup>25</sup> Ibid.h.52.

setempat adlah hal wajar dapat dikategorikan ke dalam pelecehan seksual jika perbuatan tersebut tidak di kehendaki oleh si penerima.

M. Sudrajat Bassar mengatakan bahwa:

Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.<sup>26</sup>

#### 1.8.5 Pasal-pasal Tentang Kejahatan Pencabulan/persetubuhan

Pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan pencabulan baik dalam KUHP maupun Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu, KUHP di jelaskan dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296. Sedangkan Undang-undang no.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan dalam Pasal 82.

Adapun isi dari pasal-pasal yang mengatur tentang delik pencabulan sebagai berikut:

##### a) Pasal 289 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan

---

<sup>26</sup> Yesmil Anwar Andang, Loc.cit., h.323.

cabul, di hukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

b) Pasal 290 KUHP

1e. “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya” .

2e. “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin”.

3e. “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin”.

c) Pasal 292 KUHP

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, di hukum penjara selama-lamanya lima tahun.

d) Pasal 293 Ayat (1) KUHP

Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, di hukum penjara selama-lamanya lima tahun.

e) Pasal 294 KUHP

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang di percayakan padanya untuk ditanggung, di didik atau di jaga, atau dengan bujang atau orang dibawahnya yang belum dewasa, di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun .

f) Pasal 295 KUHP

1e. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang di bawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya,

dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang di bawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain”.

2e. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, di luar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

g) Pasal 296 KUHP

Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain di hukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000 ( lima belas ribu rupiah).

h) Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak menegaskan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- i) Pasal 81 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain , dipidana dengan pidana penjara paling lama 15(lima belas tahun) dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

#### 1.8.6 Pengertian Visum et repertum

Di bawah ini akan dijelaskan tentang pengertian VER (Visum Et Repertum) yaitu:

Visum et repertum adalah keterangan yang di buat oleh dokter kehakiman mengenai kondisi korban dan sebab kematian atau lukanya.<sup>27</sup>

Visum et repertum disingkat VeR adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia. Visum et repertum kemudian digunakan bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan, maupun korban yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa (korban). Khusus untuk perempuan visum et repertum termasuk juga pernyataan oleh dokter apakah seseorang masih perawan atau tidak.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Andi Hamsah, Loc.cit., h.173.

<sup>28</sup> <http://adjiebagus07.blogspot.com/2009/09/pengertian-visum-et-repertum.html>. 11.55 AM.

## 1.9 Metode Penelitian

### 1.9.1 Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan – peraturan yang tertulis atau bahan – bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>29</sup>

### 1.9.2 Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari perundang-undangan atau dari bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen.

---

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.13.

#### 1.9.2.1 Data sekunder terdiri dari :

Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Kitap Undang-undang Hukum Perdata
5. Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi literatur-literatur yang berupa buku, jurnal, makalah dan hasil penelitian.

Bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel pada surat kabar atau koran dan majalah.



### 1.10 Pengumpulan Data

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, ini berlainan dengan data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.<sup>30</sup>

#### 1.10.1 Teknik Analisis Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema – tema dan merumuskan hipotesa – hipotesa, meskipun tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber – sumber yang ada<sup>31</sup>, Penulis dalam analisa data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata – kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, potret, tape video, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat

---

<sup>30</sup> Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2010, h.57.

<sup>31</sup> Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 66

dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit, karena itu analisis kualitatif tidak menggunakan alat bantu statistika.<sup>32</sup>

#### 1.10.2 Sistematika Penulisan

Pemaparan dari sistematika penulisan ini bertujuan supaya di dalam proses penyampaian materi dari proposal skripsi ini dapat mudah dipahami. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, pada tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisi uraian dari isi tulisan ini yang bertujuan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai topik yang akan dibahas dalam skripsi ini. Bab I terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab II menjawab rumusan masalah kedua mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Dalam bab kedua ini terdiri atas dua sub bab yakni pertama tentang faktor internal. Sub bab kedua tentang faktor eksternal.

Bab III menjawab rumusan masalah pertama mengenai bagaimana bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana

---

<sup>32</sup> Rianto Adi, Op.cit., h.128.

pencabulan anak dibawah umur (Studi Kasus Putusan Nomor. 3046/Pid.B/2010/PN.Sby.) Dalam Bab dua ini terdiri atas tiga sub bab yaitu pertama mengenai gambaran singkat terhadap contoh kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur . Kedua mengenai bentuk pertanggung jawaban pidana tindak pidana berdasarkan putusan Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Yang ketiga mengenai Analisa kasus pertanggung jawaban pidana pencabulan anak dibawah umur.

Bab IV merupakan bab penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan proposal ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian dikemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan yang ada, yang sekiranya dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

#### 1.11 Lokasi Penelitian

Penulis menyusun penelitian skripsi ini yang berjudul **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor.3046/Pid.B/2010/PN.Sby)** berlokasi di Pengadilan Negeri Surabaya

### 1.12 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan April sampai dengan juli 2012. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April Minggu pertama. Tahap persiapan penelitian ini meliputi : Penentuan judul penelitian, penulisan proposal, seminar proposal dan perbaikan proposa. Tahap pelaksanaan penelitian selama 2 bulan terhitung mulai minggu pertama bulan April sampai Juli minggu terakhir, meliputi : pengumpulan sumber data sekunder, pengolaan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian selama bulan terakhir pada bulan juni, meliputi : kegiatan penulisan laporan penelitian, pendaftaran ujian lisan dan melakukan ujian skripsi.